

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kesetaraan gender bukan hanya soal menyamakan derajat antara laki-laki dan perempuan. Lebih dari itu, kesetaraan gender berbicara tentang hak asasi, emansipasi, pemberdayaan serta inklusi yang dapat diwujudkan oleh satu individu sampai sebuah negara sekalipun (Aulia et al., 2024). Dalam konteks kesetaraan gender global, pendekatan feminisme memiliki peran yang penting untuk meninjau posisi perempuan dalam tatanan sosial. Penghapusan struktur sosial yang biasa menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak dapat menjangkau adanya kebebasan dalam kehidupan merupakan inti dari paham feminisme (Tong, 2018). Feminisme memandang adanya dominasi yang dimiliki oleh laki-laki dalam berbagai sektor kehidupan merupakan sebuah konstruksi sosial yang telah melekat dan dapat diubah melalui sebuah kebijakan hukum dan transformasi budaya. Hal ini mewujudkan adanya upaya akan peningkatan kesetaraan gender yang tidak hanya berasal dari perubahan perilaku sosial, namun juga membutuhkan legitimasi serta dukungan politik, salah satunya melalui kebijakan luar negeri berbasis feminis.

Dalam konteks inilah, beberapa negara di dunia mulai mengubah kebijakan mereka berdasarkan asas-asas kesetaraan gender. Salah satu diantaranya adalah Kanada, yang mengangkat isu kesetaraan gender dan feminisme menjadi sebuah kerangka kerja kebijakan luar negeri mereka yang mendasari adanya perubahan pada global. Dalam rangka meningkatkan kesadaran akan kesetaraan gender dan

pemberdayaan perempuan, Kanada berfokus memberikan bantuan internasional mereka kepada masyarakat terpinggir dan rentan (Canada, 2017). Bantuan luar negeri Kanada bukan sekadar dorongan ekonomi, namun berperan sebagai sebuah instrument diplomatik yang mendorong adanya perubahan sosial di negara-negara berkembang. Kanada diketahui memberikan bantuan internasional berupa investasi pembangunan internasional, dan alokasi dana di 149 negara dengan 10 negara penerima bantuan teratas yakni; Etiopia, Bangladesh, Afghanistan, Suriah, Mali, Kongo, Tanzania, Yordania, Nigeria dan Kolumbia (Global Affairs Canada, 2020). Kanada menginvestasikan 94,9% bantuan pembangunan internasional pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Angka ini mewakili investasi sebesar \$2,8 Miliar dari total dana yang dikeluarkan oleh Kanada pada tahun 2018 sampai 2019 (Global Affairs Canada, 2020).

Bantuan luar negeri Kanada merealisasikan kesadaran akan kesetaraan gender di beberapa negara berkembang dan negara-negara yang terlibat dalam konflik melalui *Feminist International Assistance Policy (FIAP)*. FIAP merupakan kerangka kerja diplomatik yang diluncurkan pada tahun 2017 di bawah pemerintahan Perdana Menteri mereka saat itu, Justin Trudeau sebagai sebuah pembaharuan atas keadaan global yang terus berubah (Global Affairs Canada, 2017). Sebagai instrumen yang diharapkan dapat memajukan implementasi Agenda 2030 untuk *Sustainable Development*, FIAP Kanada berkecimpung di enam bidang kemanusiaan, antara lain; (1) *Gender equality and the empowerment of women and girls*, (2) *Human dignity*, (3) *Growth that works for everyone*, (4) *Environment and climate action*, (5) *Inclusive governance*, serta (6) *Peace and security*. Pengambilan

fokus kepada enam bidang kemanusiaan ini melandasi keinginan Kanada untuk mencapai kesetaraan gender serta menindaklanjuti sumber utama dari ketidakadilan (Global Affairs Canada, 2017). Salah satu program strategi dari FIAP yang berfokus pada negara-negara berkembang dan rentan konflik adalah *Canada's Middle East Engagement Strategy* yang telah mengalokasikan dana sebesar \$4,7 Miliar sampai dengan 2025. Negara yang menjadi penerima bantuan utama dalam strategi ini adalah negara berkonflik seperti Irak dan Suriah, serta negara yang terdampak konflik seperti Lebanon dan Yordania (Government of Canada, 2025).

Sebagai salah satu dari 10 negara teratas penerima bantuan dari FIAP Kanada, Yordania memiliki tantangan tersendiri dalam hal kesetaraan gender. Menurut data laporan tahunan *Global Gender Gap Reports* yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum*, negara-negara yang terdapat di Rumpun Arab (termasuk Yordania) merupakan wilayah dengan tingkat ketidaksetaraan gender paling tinggi di dunia. Pada tahun 2018, Yordania diketahui berada di urutan 138 dari 149 negara dengan data kesetaraan gender paling rendah di dunia (World Economic Forum, 2018). Data ini membuktikan bahwa Yordania masih menjadi salah satu negara dengan ketidaksetaraan gender yang tinggi, khususnya dalam bidang ekonomi dan pendidikan yang condong kepada laki-laki.

Data dari *Gender Data Portal* yang dipublikasikan oleh *World Bank*, menunjukkan bahwa sebanyak 57.9% perempuan di Yordania memiliki keterbatasan akses pendidikan, dan sebanyak 13% perempuan Yordania mengalami kekerasan seksual dalam kurun waktu 12 bulan di tahun 2018. Dalam sektor ekonomi, hanya ada sebanyak 14% dari total perempuan Yordania yang berhasil

mendapatkan pekerjaan layak dan bergaji, namun hanya sekitar 4.18% dari mereka yang mendapatkan tunjangan pensiun dari sektor publik (World Bank, 2022). Kondisi ini menempatkan Yordania menjadi negara dengan peringkat paling rendah dalam hal kemajuan ekonomi diantara wilayah *Middle East and North Africa* (MENA).

Peran hukum dan masalah konstitusional yang ada di Yordania juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya kesenjangan gender. Menurut *Human Rights Watch* (HRW), salah satu peraturan yang dianggap kontroversial adalah bahwa perempuan di Yordania tidak bisa mewariskan kewarganegaraan Yordania kepada anak kandung mereka. Dalam mempertahankan norma sosial, perempuan di Yordania diwajibkan untuk berfokus kepada kehidupan berkeluarga, dalam kata lain mereka dibesarkan untuk mencari seorang suami tanpa mementingkan hal lain, mereka beranggapan bahwa laki-laki adalah kunci utama dalam kehidupan mereka karena laki-laki adalah pencari nafkah utama yang memiliki tanggungjawab untuk menafkahi keluarga (Tamer Koburtay et al., 2023). Data dari *Social Security Corporation* (2019) juga mengatakan bahwa ada banyak kesenjangan gender di berbagai sektor dalam negeri di Yordania, contohnya ada sebanyak 73% kesenjangan pekerja perempuan dan laki-laki di sektor pariwisata, 56% di sektor pembangunan dan 83,4% di sektor pendidikan. Kesenjangan gender juga berlaku di ranah politik Yordania, diketahui hanya 15 dari 130 kursi parlemen Yordania yang diduduki oleh perempuan (Inter-Parliamentary Union, 2024).

Sebelum intervensi FIAP Kanada masuk, Yordania diketahui pernah menerima bantuan luar negeri feminis dari Swedia pada tahun sebelumnya. Intervensi feminis

yang diberikan oleh Swedia dinilai kurang efektif dalam meningkatkan angka kesadaran akan kesetaraan gender di Yordania. Hal ini disebabkan karena bantuan yang diberikan Swedia berfokus dalam wilayah *Middle East and North Africa* (MENA) secara keseluruhan dan hanya memberikan bantuan tunggal kepada sebuah negara melalui organisasi internasional seperti UN Women. Dalam kondisi seperti ini, Kanada memberikan intervensi mereka kepada Yordania melalui FIAP guna meningkatkan pemberdayaan perempuan, mendukung perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender, memperkuat kapasitas pelayanan publik, serta memperluas kesempatan ekonomi bagi perempuan di wilayah rentan konflik. Intervensi ini diharapkan dapat memberikan peningkatan dalam tata kelola inklusif negara dalam upaya pencapaian kesetaraan gender, khususnya bagi perempuan.

Untuk meninjau ulang isu yang penulis ambil, penulis telah menelaah beberapa jurnal yang dianggap sejalan dengan pembahasan yang akan dibahas dalam tulisan ini. Jurnal pertama yang telah ditinjau merupakan jurnal yang berfokus dalam permasalahan dan perkembangan kesetaraan gender di negara-negara Arab yang ditulis oleh Annisa Malinda berjudul “Perkembangan Kesetaraan Gender di Negara-Negara Arab”. Dari jurnal ini penulis dapat mengetahui bahwa negara-negara Arab masih menempati posisi terendah dalam hal kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam beberapa bidang masih sangat terbatas. Namun, seiring berjalannya waktu para perempuan telah memperjuangkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan sehingga partisipasi mereka dalam ranah domestik telah mengalami peningkatan. Selanjutnya adalah jurnal berjudul “Kerjasama UN Women dan Swedia dalam Pemberdayaan Pengungsi Perempuan Suriah di

Yordania” yang disusun oleh Andrea Celine Nugroho. Jurnal ini berisikan tentang program kerjasama antara Swedia dengan UN Women untuk memberdayakan para pengungsi perempuan Suriah di Yordania (Nugroho, 2017).

Tulisan selanjutnya yang penulis tinjau adalah tulisan-tulisan yang membahas tentang Bantuan Luar Negeri Kanada melalui FIAP mereka, yakni skripsi dari Khansa Adilla Rinda Putri yang berjudul “Implementasi *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) Kanada dalam Mencapai Kesetaraan Gender di Irak Tahun 2017-2023” serta skripsi dari Shalom Berlian Kinanti yang berjudul “Bantuan Luar Negeri Kanada Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di Suriah Pada Tahun 2018-2021 Melalui *Feminist International Assistance Policy* (FIAP)”. Kedua tulisan ini menganalisis tentang implementasi kebijakan luar negeri feminis dari Kanada di negara-negara Timur Tengah seperti Suriah dan Irak. Dalam tulisannya, Khansa dan Shalom menjelaskan bahwa perempuan di Irak dan Suriah masih memiliki keterbatasan akses ke dalam parlemen politik, mata pencaharian domestik dan masih menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga dan masalah kesehatan seksual serta reproduksi. FIAP Kanada menjadi sebuah intervensi yang berpengaruh dalam bidang pemberdayaan perempuan khususnya di wilayah Timur Tengah sebagai sebuah wilayah yang sering terdampak konflik. Melalui FIAP, Kanada berhasil memberikan alokasi dana, memberikan penyuluhan dan program pemberdayaan perempuan di Irak dan Suriah sehingga menghasilkan peningkatan pada indeks gender di kedua negara ini.

Dalam kedua kelompok literatur yang telah ditinjau sebelumnya, penulis menemukan adanya *research gap* atau celah penelitian yang akan penulis gunakan

sebagai fokus penelitian utama dalam tulisan ini. Celah penelitian yang telah ditemukan adalah belum ada tulisan yang membahas tentang bantuan luar negeri yang diberikan oleh Kanada kepada Yordania selaku salah satu negara dengan budaya patriarkis yang berada di wilayah Timur Tengah. Fokus penelitian kali ini adalah tentang implementasi program pemberdayaan perempuan yang diberikan oleh Kanada di Yordania. Penelitian ini akan berfokus pada tahun 2019-2024 dengan latar belakang bantuan luar negeri feminis dari Kanada yang masuk ke Yordania dimulai pada tahun 2019 dan laporan terakhir yang diterima dari beberapa lembaga organisasi adalah laporan hasil pada tahun 2024.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Implementasi Bantuan Luar Negeri Kanada Dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender di Yordania Melalui *Feminist International Assistance Policy* pada tahun 2019-2024?"

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Secara Umum**

Secara umum, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kontribusi kepada Program Studi Hubungan Internasional, khususnya dalam ruang lingkup studi gender dan bantuan luar negeri internasional. Secara keseluruhan, penelitian ini dilakukan sebagai syarat utama penyusunan skripsi serta syarat utama untuk memperoleh gelar

Sarjana (S1) Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

### **1.3.2 Secara Khusus**

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bantuan luar negeri yang diberikan Kanada melalui Feminist International Assistance Policy (FIAP) untuk meningkatkan kesetaraan gender di Yordania pada tahun 2019 sampai dengan 2024.

## **1.4 Kerangka Teori**

### **1.4.1 Bantuan Luar Negeri**

Dalam bukunya yang berjudul *Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics*, Carol Lancaster menjelaskan bahwa Bantuan Luar Negeri adalah sebuah elemen khusus yang dimiliki oleh sebuah negara untuk memberikan bantuan kepada negara lain berupa transfer sukarela dalam bentuk barang, modal maupun jasa (Lancaster, 2007). Bantuan seperti ini tidak hanya dilakukan oleh sebuah negara, namun dapat diberikan juga oleh Organisasi Internasional kepada sebuah negara. *Foreign Aid* atau bantuan luar negeri ini memiliki tujuan untuk mensejahterakan kondisi masyarakat pada negara penerima bantuan (Lancaster, 2007). Di sisi lain, Bindra mengatakan bahwa Bantuan Luar Negeri merupakan alokasi bantuan dana, maupun bantuan dalam bentuk lain untuk membantu negara-negara penerima mencapai target pembangunan ekonomi atau bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Bentuk bantuan ini bisa berupa bantuan dalam

bentuk jasa seperti relawan individu maupun hibah yang disalurkan lewat pemerintah negara tujuan (BINDRA, 2018).

Lancaster beranggapan bahwa paradigma hubungan internasional (*Realism, Liberalism, Constructivism*) dapat mendefinisikan bantuan luar negeri dari sudut pandang yang berbeda beda. Disaat paham realisme menitikberatkan bantuan luar negeri sebagai sebuah instrumen politik yang berfokus pada keamanan suatu negara, paham idealis justru beranggapan bahwa bantuan luar negeri merupakan bentuk diplomasi dan tanggungjawab moral untuk negara-negara miskin (Lancaster, 2007). Lancaster mengatakan bahwa bantuan luar negeri tidak selalu berbentuk perpindahan uang dari negara pendonor ke negara penerima tetapi bisa juga dalam mewujudkan pembangunan fisik. Pembangunan ini bisa meliputi pembiayaan berbagai kegiatan dalam pembangunan sumber daya manusia seperti mengatasi masalah global, mempromosikan demokratisasi, serta mengelola transisi pasca konflik (Lancaster, 2007). Menurut Bindra, bantuan luar negeri menciptakan suatu hubungan antara negara atau organisasi pemberi bantuan dan negara penerima bantuan. Bantuan tersebut juga dapat digunakan para negara pemberi untuk mempengaruhi negara penerima untuk beranggapan bahwa hal ini merupakan bentuk ketergantungan atau bantuan timbal balik (BINDRA, 2018).

Efektivitas sebuah bantuan luar negeri, menurut Lancaster, sangatlah bergantung pada kondisi sebuah negara. Hal ini berkaitan dengan kualitas tata kelola suatu negara penerima serta kesesuaian bantuan dengan

permasalahan dan kebutuhan lokal yang ada pada negara penerima (Lancaster, 2007). Seiring dengan perkembangan global, bentuk bantuan luar negeri mengalami transformasi. Bukan hanya melalui investasi dana atau hal yang bersifat materialistis, bantuan luar negeri juga bisa berupa pembangunan infrastruktur, penyaluran jasa, dan pemetaan program kerja. Salah satu contoh bentuk bantuan luar negeri yang menyalurkan bantuan dengan berbagai bentuk adalah bantuan luar negeri feminis yang berfokus kepada pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesetaraan gender.

#### **1. 4. 2. Feminist Foreign Policy**

*Feminist Foreign Policy* (FFP) merupakan sebuah kebijakan yang berfokus kepada kesetaraan gender, perspektif feminis dan hak-hak perempuan dalam pengambilan keputusan di ranah internasional. FFP biasanya berfokus pada konstitusi yang normatif dan praktis yang berfungsi untuk memberikan kesetaraan dalam masyarakat, komunitas, atau bahkan individu yang berbeda. Bukan hanya itu, FFP juga berperan penting dalam pembentukan kebijakan yang bersifat netral dan tidak mengandung hal sensitif seperti diskriminasi dan patriarki (Jessica Cheung, 2021). FFP tentu saja berbeda dengan *Foreign Policy* pada umumnya, perbedaan ini terletak pada tujuan dan fokus utama. FFP lebih berfokus pada pemberdayaan perempuan dan memajukan kesetaraan gender, kebijakan ini berusaha memberikan peningkatan partisipasi perempuan dan penghapusan diskriminasi. Sedangkan *Foreign Policy* hanya berfokus pada kepentingan

nasional seperti hubungan diplomatik, keamanan negara, aliansi militer dan perdagangan internasional.

Sebagai sebuah instrument diplomatik, FFP dapat diterapkan oleh sebuah negara sebagai komitmen atas kebijakan yang berfokus pada kesetaraan gender. Dalam konteks ini, *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) milik Kanada merupakan bentuk paling nyata akan penerapan FFP. Menandai adanya pergeseran penting pada konteks bantuan luar negeri, Tiessen mengatakan bahwa FIAP memiliki potensi yang cukup besar dalam perubahan global karena secara gamblang mencantumkan kata ‘feminis’ di dalamnya (Tiessen, 2019). Pergeseran penting ini juga mengarah kepada pemikiran lalu yang melihat perempuan sebagai sebuah ‘objek’ bantuan menjadi sebagai ‘subjek’ aktif dalam konteks bantuannya (Tiessen, 2019). FIAP berfokus pada bantuan yang berbasis pada hak-hak perempuan dalam pembangunan, prioritas dari FIAP meliputi perubahan iklim, perdamaian dan keamanan, tata kelola inklusif, dan martabat manusia (Rao & Tiessen, 2020).

Rao dan Tiessen mengatakan bahwa kerangka kerja FIAP Kanada diikuti oleh tiga turunan yang menjadi komponen utama indikator kesetaraan gender. Turunan ini biasa disebut 3R, yakni *Rights, Resources and Representation* (Rao & Tiessen, 2020).

#### **1. 4. 2. 1 Rights (Hak)**

Salah satu pilar dari Kebijakan Luar Negeri Feminisme adalah *Rights (Hak)* yang berfokus kepada hak-hak setiap perempuan. Pilar ini memperjuangkan dan mempromosikan hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia dan melindungi para perempuan dari berbagai kekerasan berbasis gender serta diskriminasi (Poblete, 2018). Bentuk bantuan dalam pilar *rights* biasanya berupa program untuk *Sexual and Reproductive Health & Rights (SRHR)* serta pengupayaan kemudahan akses layanan kesehatan yang aman dan bermartabat (Chidwick et al., 2024)

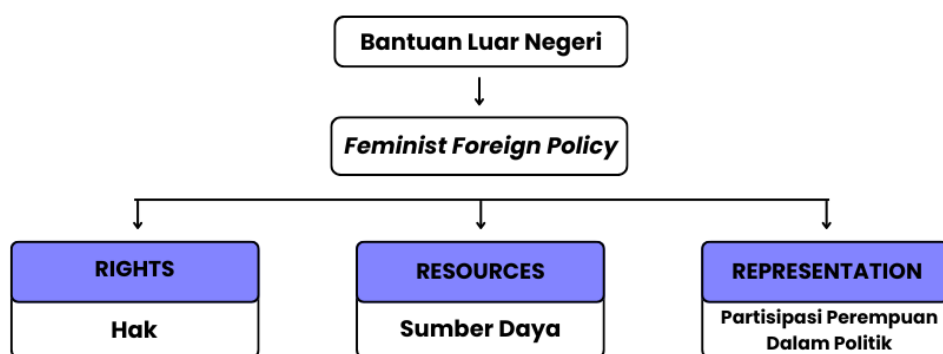
#### **1. 4. 2. 2 Resources (Sumber Daya)**

Pilar Resources atau sumber daya ini berfokus pada keadilan dan kesetaraan sumber daya baik dari segi pemerataan sumber daya alam dan keadilan distribusi perekonomian sebagai bentuk untuk mencapai penerapan sumber daya alam dan hak asasi manusia yang adil bagi semua kelompok masyarakat (Poblete, 2018). Dalam pilar *resources*, bentuk bantuan yang diberikan biasanya berupa program pendidikan dan pelatihan ketrampilan ekonomi, proyek-proyek pendanaan serta bantuan infrastruktur seperti pembangunan sekolah ramah perempuan dan pelatihan guru (Chidwick et al., 2024)

### 1. 4. 2. 3 Representation (Representasi)

Pilar representasi mengarah pada partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di semua tingkatan dalam semua bidang, utamanya dalam konteks perdamaian (Poblete, 2018). Pilar ini juga mengupayakan peningkatan jumlah perempuan yang andil di dalam organisasi internasional dan kursi pemerintahan, memberdayakan perempuan sebagai *Agent of Change* dalam masyarakat domestik serta kesetaraan suara dalam perumusan kebijakan (Mohamed, 2024). Bentuk dari bantuan di pilar representation biasanya berupa pelatihan kepemimpinan, pendampingan organisasi, advokasi kebijakan, dan pendanaan proyek yang memperkuat suara perempuan dalam ranah politik (Chidwick et al., 2024).

### 1. 5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1. 1 Sintesa Pemikiran

Sumber: Dibuat oleh Penulis

Bagan sintesa pemikiran diatas berperan sebagai skema untuk menjawab rumusan masalah. Bantuan luar negeri merupakan konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini, dimana intervensi yang diberikan Kanada untuk Yordania merupakan bentuk dari bantuan luar negeri. *Feminist Foreign Policy* merupakan bentuk manifestasi dari bantuan luar negeri feminis yang kemudian membagi fokus bantuan untuk pemberdayaan perempuan menjadi 3R (*Woman's Rights, Woman's Resources, Woman's Representation*).

## 1. 6 Argumentasi Utama

Berdasarkan latar belakang, argumen utama yang penulis berikan adalah implementasi *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) yang diberikan oleh Kanada pada tahun 2019 sampai 2024 telah memberikan dampak dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Yordania. Tulisan ini akan dikaji menurut 3 komponen utama dari FIAP Kanada yaitu *Rights, Resources,* dan *Representation*. Melalui *Rights*, FIAP Kanada memberikan program *Power to Choose* yang bekerja sama dengan *Oxfam-Québec*. Program ini bertujuan dalam menutup kesenjangan akut dalam *Sexual and Reproductive Health & Rights* (SRHR) terutama untuk gadis remaja; mendukung advokasi lokal, tingkat komunitas hingga internasional dengan alokasi pendanaan sebesar \$39.500.000 CAD dalam kurun waktu 7 tahun dari 2019-2026. Dalam pilar *Resources*, Kanada memberikan penyuluhan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui *Launching Economic Achievement Program (LEAP) for Woman in Jordan* dengan alokasi dana sebesar \$4,900,000 CAD sampai dengan 2023.

FIAP Kanada juga memberikan penguatan partisipasi dan hak sipil perempuan sebagai upaya dari pilar *Representation* di Yordania melalui program *Women's Voice and Leadership* dengan total alokasi dana sebesar \$1.840.000 CAD setiap tahunnya serta menyalurkan dana bantuan lain melalui *The Canada Fund for Local Initiatives* (CFLI) untuk program domestik yang dimiliki Yordania. Program lain yang diberikan Kanada antara lain *Supporting Gender Mainstreaming in Government of Jordan's Systems* yang bekerjasama dengan UN Women, *Canada's National Action Plan on Women, Peace and Security*, *Canada's 10 Years Commitment to Global Health and Rights*, *WE-LEAD Projects*, *Burden of Childcare Reduced for Women in Jordan*, dan berbagai bantuan infrastruktur serta alokasi pendanaan.

Melalui indikator 3R dari FIAP, Pemerintah Kanada telah memberikan upaya untuk pemberdayaan perempuan di Yordania, namun FIAP Kanada menemukan tantangan dalam implementasi mereka, yakni pada tahun 2019 beberapa program yang didanai oleh FIAP Kanada mengalami pemberhentian selama satu tahun karena terdampak COVID-19. Program-program tersebut akhirnya dilanjutkan dan pada awal tahun 2020 menggunakan kerangka kerja yang sama. Meski melewati tantangan yang tidak diinginkan, konsistensi akan program yang diberikan oleh Kanada menunjukkan bahwa intervensi yang responsif mampu membuka ruang yang berkelanjutan bagi perempuan di Yordania.

## **1. 7 Metodologi Penelitian**

### **1. 7. 1 Tipe Penelitian**

Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif untuk menganalisa data dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono dalam (Salma, 2023), Tipe Penelitian Deskriptif adalah sebuah penelitian yang menjelaskan tentang gambaran dari data-data penelitian secara spesifik berdasarkan peristiwa sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian Deskriptif juga bisa disebut sebagai penelitian yang berusaha untuk menjawab pertanyaan 5W (*What, When, Where, Who, Why*) dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang bersifat deskriptif seperti jurnal, *report*, buku dan lain sebagainya. Metode yang akan diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dari beberapa data mengenai keberhasilan program bantuan dari Kanada untuk mewujudkan kesetaraan gender yang berarti di Yordania. Penulis akan mengambil kesimpulan dari data-data literatur tentang program bantuan dari Kanada yang sudah dan akan berjalan di Yordania sebagai bentuk bantuan untuk meningkatkan kesetaraan gender.

### **1. 7. 2. Jangkauan Penelitian**

Penelitian “Bantuan Luar Negeri Kanada Dalam Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender di Yordania Melalui *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) Pada Tahun 2019-2024” akan mengambil jangkauan mulai tahun 2019 dimana intervensi dari FIAP Kanada dalam ranah program *Gender-Focused* mulai meningkat. Pada

tahun yang sama, beberapa undang-undang tentang pemberdayaan perempuan mulai diterapkan di Yordania. Penelitian ini akan dianalisis sampai dengan tahun 2024, dimana laporan terakhir program-program kerja di publikasikan.

### **1. 7. 3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam tulisan ini adalah teknik pengumpulan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, data sekunder biasanya dikaji ulang dari beberapa data yang sudah dipublikasikan untuk umum seperti artikel jurnal dan berita (Ahmad, 2024). Data sekunder akan diperoleh melalui *website* resmi dari beberapa program yang sedang berlangsung di Yordania seperti *website* resmi dari *Government of Canada* dan *Government of Jordan*, serta Organisasi Internasional seperti UN Women, *World Bank*, UNFPA, OECD dan berbagai laman resmi lainnya. Teknik pengumpulan data akan melewati proses yang sistematis dengan cara menganalisa, mengevaluasi serta meninjau ulang beberapa literatur dan sumber data agar dapat memberikan *output* yang relevan dengan topik penelitian kali ini.

### **1. 7. 4. Teknik Analisa Data**

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik analisa kualitatif untuk meninjau dan menganalisa ulang seluruh data yang diperoleh. Teknik analisa data kualitatif merupakan sebuah teknik analisa

yang berfokus kepada pengolahan dan pengumpulan data yang bersifat deskriptif seperti artikel jurnal, wawancara, serta observasi yang bertujuan untuk mengolah aspek-aspek yang lebih kompleks yang tidak dapat diukur melalui metodologi kuantitatif (Rohmah, 2024). Melalui metode kualitatif, penulis akan berusaha menggambarkan program kerjasama antara Kanada dan Yordania untuk meningkatkan kesetaraan gender dengan komprehensif, terstruktur dan terperinci.

#### **1.7. 5. Sistematika Penulisan**

Suatu syarat untuk sebuah tulisan dapat disebut penulisan yang bersifat ilmiah adalah penelitian harus ditulis secara sistematis, dalam artian tulisan ini disusun berdasarkan kaidah yang runtut dan jelas. Adapun sistematika yang terdapat dalam penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I : Bab I berisikan pendahuluan. Bab ini merupakan bab awal yang menguraikan pendahuluan dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tinjauan Literatur, Kerangka Teori, Sintesa Pemikiran, Argumentasi, Metodologi dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Bab II membahas tentang komponen dari FIAP milik Kanada, yaitu *Resources* (Sumber Daya).

Bab III : Bab III membahas tentang poin lanjutan dari FIAP Kanada yaitu *Rights* (Hak) dan *Representation* (Representasi).

Bab IV : Berisikan kesimpulan dan saran.